

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

1. Abdulkadir, Muhammad, 2003, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
2. Abdulkadir Muhammad, 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
3. Carl Joachim, Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
4. Djumialdji, F.X, 1997, *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
5. Domikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
6. Amalia, Euis, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Persada.
7. Fajar Laksono, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD*, Bandung: Citra Aditya Bakti
8. F.X.Djumialdji, 1997, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara Bakti.
9. Husni, Lalu, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
10. Indra Afrita, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta: Absolute Media.
11. Iman Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
12. Lalu Husni, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
13. Maimun, 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
14. Muljadi dan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

15. Soepomo, Iman. 2007. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
16. Salim.,*et.al.*, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU). Jakarta: Sinar Grafika.
17. Subekti, 1987, Hukum perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.
18. Wijayanti, Asri, 2009, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
19. Yustisia, Tim Visi, 2014, Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS, cet.1, Jakarta: Transmedia Pustaka.
20. Zainal Asikin, 2004, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet.V, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja yang tidak mendaftarkan jaminan sosial kepada pekerjanya.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua.

10. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

C. Jurnal/E-Journal

1. Damanhuri Fattah. 2013. “Teori Keadilan menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No.2, 2013.
2. Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum Jakarta, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 219

D. Website

1. Rishna Maulina, 2019, Human Resources (HR), Sumber Daya Manusia, <https://sleekr.co/blog/kewajiban-mendaftarkan-karyawan-dalam-program-bpjs-perusahaan>.
2. Diana Kusumasari, 2011, Hukum Menahan Surat Berharga Milik Karyawan yang Sudah Berhenti Bekerja, Hukum Online, URL : <https://hukumonline.com/klinik/a/aturan-hukum-hak-asasi-karyawan-cl5979/>.